

Pemerintah Nagari dan Upaya Memberdayakan Masyarakat (Studi di Nagari Koto Rantang Kecamatan Palupuh Kabupaten Agam)

Popi Milakarma, Maria Montessori

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Universitas Negeri Padang

E-mail: Poppymilakarma@gmail.com

ABSTRAK

Pemerintah nagari merupakan subsistem dari penyelenggaraan pemerintahan, sehingga nagari memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Salah satu tugas pokok dari pemerintah nagari adalah memberdayakan masyarakat nagari. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan upaya pemerintah nagari dalam memberdayakan masyarakat petani di nagari Koto Rantang Kecamatan Palupuh Kabupaten Agam. Penelitian dilakukan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Informan penelitian dipilih secara purposive sampling yang terdiri dari Pemerintah Nagari Koto Rantang, Penyuluh Pertanian Lapangan, Tokoh Masyarakat, dan Petani. Data penelitian dikumpulkan dengan observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis melalui tiga tahap yaitu reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah nagari dalam memberdayakan masyarakat petani di nagari Koto Rantang yaitu: pertama penguatan kelompok tani dan Gapoktan, kedua memberikan pelatihan dan penyuluhan, ketiga memberikan bantuan sarana produksi seperti pupuk, mesin perontok padi, serta benih dan bibit tanaman. Akan tetapi dalam melaksanakan upaya pemberdayaan masyarakat petani, pemerintah nagari Koto Rantang mengalami kendala-kendala di antaranya rendahnya kemauan masyarakat petani untuk bergabung dalam kelompok tani, petani menggunakan kelompok tani hanya untuk kepentingan tertentu, serta masyarakat petani susah adopsi teknologi.

Kata Kunci: pemberdayaan masyarakat, pemerintah nagari

ABSTRACT

Nagari government is a sub-system of governance so that Nagari has the authority to regulate and manage the interests of its people. One of the main tasks of the Nagari government is to empower the Nagari community. This study aims to describe the efforts of the nagari government in empowering the farming community in the nagari Koto Rantang District of Palupuh, Agam Regency. The study was conducted using a qualitative approach with descriptive methods. Research informants were selected by purposive sampling. Research data were collected by observation, interview, and documentation study. The results showed that there were several efforts made by the Nagari government in empowering the farming

community in the Koto Rantang village, namely: first strengthening the farmer groups and Gapoktan, second establishing cooperation with the Agricultural Extension office of Palupuh District, third providing assistance in production facilities such as fertilizers, rice thresher machinery, as well as seeds and plant seeds. However, in carrying out efforts to empower the farming community, the Nagari government of Koto Rantang experienced obstacles including the low willingness of the farming community to join farmer groups, farmers using farmer groups only for certain interests, and the farming community had difficulty adopting technology.

Keywords : *community empowerment, nagari government*



This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. ©2019 by author and Universitas Negeri Padang.

PENDAHULUAN

Pemerintah nagari sebagai unit pemerintahan terdepan yang langsung melayani dan hidup bersama masyarakat memiliki peran yang strategis dalam memberdayakan masyarakat di wilayahnya. Pemerintah mempunyai 3 fungsi hakiki yaitu pelayanan (service), pembangunan (development), dan pemberdayaan (empowerment) (Sarjono, 2014). Pelayanan akan membuahkan keadilan dalam masyarakat, pembangunan akan menciptakan kemakmuran dalam masyarakat, dan pemberdayaan akan mendorong kemandirian masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat yang harus menjadi fokus bagi pemerintah adalah pemberdayaan masyarakat petani. Karena sebagian besar masyarakat Indonesia bekerja di sektor pertanian dan kenyataan yang harus diakui bahwa petani di Indonesia masih banyak yang termasuk dalam golongan keluarga miskin terutama di wilayah pedesaan. Berdasarkan data yang diperoleh dari kantor Wali Nagari Koto Rantang, jumlah penduduk di nagari Koto Rantang 2.552 jiwa, 75% dari jumlah tersebut

merupakan masyarakat yang bermata pencaharian sebagai petani, di nagari Koto Rantang terdapat 685 Kepala Keluarga (KK), dimana 36% dari jumlah tersebut termasuk dalam golongan kepala keluarga miskin yang didalamnya mayoritas masyarakat petani.

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dengan masyarakat petani di nagari Koto Rantang, permasalahan yang mereka temui dalam menjalankan usaha tani diantaranya: masih banyak petani yang kekurangan modal untuk menjalankan usaha tani. Kedua, fenomena perubahan cuaca yang sering terjadi dimana pada saat musim penghujan, hujan seringkali turun dengan intensitas yang cukup tinggi sehingga banyak tanaman yang rusak, apalagi nagari Koto Rantang kondisinya berbukit dan berlembah, sehingga apabila terjadi hujan dengan intensitas yang cukup tinggi banyak bukit dan pematang sawah yang longsor sehingga tanah dan pohon-pohon besar yang ada di bukit terbawa oleh longsor hingga menimbun dan merusak lahan pertanian petani. Ketiga petani di Nagari Koto Rantang kesulitan dalam menanggulangi hama

yang sering menyerang tanaman seperti tikus, monyet, kera, burung, babi hutan, dan keong sawah. Keempat, tidak adanya jaminan harga saat panen raya sehingga petani terpaksa menjual hasil panennya dengan harga yang sangat murah.

Bila dilihat dari kondisi geografis sesungguhnya nagari Koto Rantang sangat potensial untuk pertanian, baik untuk menanam tanaman pangan, hortikultura maupun perkebunan, namun dengan berbagai permasalahan yang dihadapi hasil usaha tani menjadi tidak maksimal, ini di buktikan dengan data yang diperoleh dari Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Palupuh bahwa hasil produksi pertanian padi petani di Nagari Koto Rantang perpanennya sebanyak 5 Ton/Ha. Sementara indikator keberhasilan suatu lahan garapan sawah menghasilkan padi perpanennya maksimal 9-10 Ton/Ha. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Ahmar (2016) dalam menjalankan usahanya petani menemui berbagai kendala terutama dari bantuan bibit dan pupuk, dimana belum adanya upaya dari pemerintah mendapatkan bibit unggul dan pupuk ramah lingkungan yang terjangkau bagi masyarakat. Penelitian yang sama dilakukan oleh Muhammad Indra Wijaya (2017) hasil penelitian menunjukkan hasil panen petani tidak mencukupi bagi masyarakat untuk meningkatkan kebutuhan dan ekonomi, masyarakat juga mengeluhkan kurangnya kegiatan penyuluhan, kurangnya bantuan modal dan peralatan pertanian, serta pemerintah tidak membantu petani dalam memasarkan hasil panennya sehingga petani harus menjual sendiri dengan harga yang jauh lebih murah.

Penelitian yang dilakukan oleh Syahyuti (2014) menemukan bahwa beberapa kebijakan berkaitan dengan organisasi petani belum ideal, sosialisasi masih lemah, dan petani sendiri belum memahami kesempatan yang telah disediakan. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Apsari (2017) menemukan bahwa selain memiliki potensi, terdapat beberapa masalah yang dihadapi oleh para petani, yaitu belum memiliki sarana produksi pasca panen, masih kurangnya alat/mesin untuk proses produksi dan belum memiliki modal yang cukup. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Hendrawati (2018) ada beberapa faktor yang menghambat pemberdayaan petani, yaitu ketersediaan benih padi dan pupuk masih sering mengalami keterlambatan, pembinaan manajemen kelompok tani masih belum maksimal, dan kondisi jaringan irigasi belum memadai. Beberapa penelitian di atas membahas mengenai pemberdayaan masyarakat di bidang pertanian.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan upaya pemerintah nagari dalam memberdayakan masyarakat petani di nagari Koto Rantang Kecamatan Palupuh Kabupaten Agam serta untuk mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi oleh pemerintah nagari Koto Rantang dalam upaya memberdayakan masyarakat petani di kenagarian Koto Rantang Kecamatan Palupuh Kabupaten Agam. Penelitian ini penting dilakukan karena jika berbagai permasalahan yang ditemui petani nagari Koto Rantang dalam menjalankan usaha taninya terus dibiarkan, maka petani di nagari Koto Rantang akan sulit untuk mencapai kesejahteraan, padahal dengan kondisi

wilayah yang sangat potensial untuk pertanian seharusnya hasil produksi dari usaha tani masyarakat bisa lebih maksimal sehingga kehidupan masyarakat bisa lebih sejahtera.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif dimana penulis akan memahami dan menggambarkan keadaan sebenarnya yang terjadi di lapangan. Penelitian Kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada objek yang alamiah, dimana peneliti adalah instrumen kunci, dalam penelitian ini tidak dipandu oleh teori tetapi oleh fakta-fakta yang ditemukan dilapangan (Sugiyono, 2014). Penelitian di lakukan di nagari Koto Rantang Kecamatan Palupuh Kabupaten Agam dengan alasan lokasi ini merupakan salah satu nagari yang sebagian besar masyarakatnya berprofesi sebagai petani, petani di daerah ini masih banyak yang menemui hambatan-hambatan dalam menjalankan usaha taninya, adanya program pemberdayaan petani yang dijalankan oleh pemerintah nagari Koto Rantang, serta akses menuju lokasi juga mudah di jangkau oleh peneliti. Dalam hal ini untuk memilih informan penulis menggunakan teknik pengambilan secara purposive sampling. Adapun informannya yaitu: aparatur pemerintah nagari Koto Rantang, Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL), pengurus gapoktan, tokoh masyarakat, dan petani di nagari Koto Rantang.

Jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari informan.

Sementara data sekunder adalah data yang di peroleh dari hasil studi dokumentasi di lokasi penelitian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui observasi, wawancara, dan studi studi dokumentasi. Untuk menguji keabsahan data pada penelitian ini penulis menggunakan teknik triangulasi sumber, Menurut Patton (dalam Maleong, 2012) triangulasi dengan sumber “berarti membandingkan dan megecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif”. Dengan teknik tringulasi dengan sumber, peneliti membandingkan hasil wawancara yang diperoleh dari masing-masing sumber atau informan penelitian sebagai pembanding untuk mengecek kebenaran informasi yang didapatkan. Selanjutnya data yang di peroleh di analisis melalui tiga tahap, yaitu reduksi data (data reduction), penyajian data (data display), serta menarik kesimpulan atau verivikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Upaya Pemerintah Nagari Dalam Memberdayakan Masyarakat Petani di Nagari Koto Rantang Kecamatan Palupuh Kabupaten Agam

Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani bahwa pemberdayaan petani merupakan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan petani untuk melaksanakan usaha tani yang lebih baik. Pemberdayaan petani dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, perbaikan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian,

Kemudahan akses ilmu pengetahuan dan teknologi serta penguatan kelembagaan petani. Berdasarkan penelitian di lapangan ditemukan bahwa untuk memberdayakan

masyarakat petani di nagari Koto Rantang ada beberapa upaya yang di lakukan oleh pemerintah nagari Koto Rantang, yaitu: penguatan kelompok tani dan Gapoktan, memberikan penyuluhan dan pelatihan, dan memberikan bantuan sarana produksi.

Upaya pertama yang dilakukan pemerintah nagari Koto Rantang yaitu penguatan kelompok tani dan gapoktan. Pemerintah nagari Koto Rantang memberikan penguatan kepada kelompok tani dan gapoktan dengan mengeluarkan SK masing-masing kelompok tani dan gapoktan. Terdapat sebanyak 27 Kelompok tani yang telah di SK kan oleh pemerintah nagari Koto Rantang dan 1 gabungan kelompok tani dengan nama Gapoktan Koto Rantang Sepakat. Untuk lebih jelasnya berikut disajikan data kelompok tani dan gapoktan di nagari Koto Rantang:

Tabel 1. Pengurus Gapoktan Koto Rantang Sepakat

No	Gapoktan Koto Rantang Sepakat	
1.	Penasehat/pelindung	Wali Nagari Koto Rantang, Bamus Nagari Koto Rantang, KAN Koto Rantang
2.	Pembina	Koordinator Petugas Tekni Pertanian Palupuh, PPL Nagari Koto Rantang, Wali Jorong se Koto Rantang
3.	Ketua	Helmi
4.	Sekretaris	Novri Agus Parta Wijaya
5.	Bendahara	Rustam Angku Sati
6.	Bidang Saprodi	Syahminar, Erianto, Huriati
7.	Bidang Usaha Tani	Inadra, Netria, M Ilham
8.	Bidang Pengolahan Hasil	H. BaringinAmeh,
9.	Pemasaran	Rugayah, Riko, Nikmah
10.	Bidang LKM-A	Alizon, Etria, Rino

Sumber: Pemerintah Nagari Koto Rantang (2018)

Tabel 2. Data Kelompok Tani di Nagari Koto Rantang yang Telah di SK kan Pemerintah Nagari

No	Nama Kelompok	Tahun Berdiri	Jumlah Anggota
1.	Talago Indah	2015	16
2.	Koto Rantang Jaya	1998	15
3.	Karya Lestari	2000	18
4.	Usaha Muda Mandiri	2012	15
5.	Guci Sepakat	2009	21
6.	Ambacang Saiyo	2009	17
7.	Tuah Sakato	1995	22
8.	Paninjauan Indah	1998	19
9.	Elok Saiyo	2008	14
10.	Tunas Harapan	2014	17
11.	Shahibul Muslimin	2009	15
12.	KWT Jelita	2012	29
13.	Sungai Abu Indah	2015	17
14.	Harapan Sepakat	2012	15
15.	Fajar Mutiara	2014	23
16.	KWT Muaro Baru	2015	25
17.	Kuntum Mekar	2008	19
18.	Muaro Baru	2005	23
19.	KWT Raflesia	2009	18
20.	Pandan Wangi	2012	16
21.	KWT Permata Bunda	2015	24
22.	KWT Aia Malambuih	2015	16
23.	Tunas Muda	2015	20
24.	KWT Fajar Mutiara	2014	28
25.	KWT Tunas Muda	2015	15
26.	KWT Elok Saiyo	2015	23
27.	KWT Bunga Tanjung	2015	15

Sumber: Pemerintah Nagari Koto Rantang (2018)

Penguatan kelompok tani dan Gapoktan merupakan hal yang mendasar dalam memberdayakan masyarakat petani. Dimana Kelompok tani dan Gapoktan merupakan pintu masuk bagi pemerintah dalam menyalurkan bantuan dan pembinaan. Kelompok tani dan Gapoktan juga menjadi wadah komunikasi antar petani, wadah dalam belajar guna meningkatkan pengetahuan dan keterampilan serta tumbuh dan berkembangnya kemandirian dalam berusaha tani sehingga meningkatnya produktifitas, bertambahnya pendapatan, serta kehidupan yang

lebih sejahtera. Keuntungan yang didapatkan oleh kelompok tani dan Gapoktan dengan adanya SK antara lain: adanya pengakuan dari masyarakat dan kelompok tani lainnya yang ada di nagari, adanya pengakuan dari pemerintah kecamatan dan kabupaten, dan jika ada program-program dari pemerintah seperti pelatihan dan pemberian bantuan berupa bibit, pupuk, dan lain sebagainya kelompok dapat di ikutsertakan. Menurut Hendrawati Hamid (2018) pentingnya kelompok tani adalah sebagai penghantar antara masyarakat desa dengan masyarakat luar desa karena sebagai wadah membangun diri dan komunitasnya, sebagai wadah untuk proses belajar mengajar, wadah menyelesaikan permasalahan, wadah mengelola inovasi, dan sebagai wadah menuju perubahan yang lebih baik.

Upaya pemerintah nagari Koto Rantang yang kedua yaitu memberikan pelatihan dan penyuluhan. Program yang diberikan pemerintah nagari Koto Rantang yaitu pelatihan Teknologi Tepat Guna (TTG) mesin dan alat pertanian. Kegiatan dalam pelatihan ini diantaranya mengolah dan memanfaatkan mesin atau alat bekas yang sudah tidak terpakai untuk digunakan sebagai alat dalam mengolah lahan pertanian dan penanganan hama tanaman. Selanjutnya program Kebun Bibit Rakyat (KBR) dan Program Tanam Padi Sebatang (PTPS). Kebun Bibit Rakyat di buat di pekarangan kantor wali nagari Koto Rantang. Perwakilan dari masing-masing kelompok tani di kumpulkan di kantor wali nagari lalu perangkat nagari yang mengkoordinatori program pelatihan di dampingi oleh petugas penyuluh

pertanian memberikan pelatihan pembuatan bibit tanaman, setelah bibit tanaman ini siap untuk di tanam maka pemerintah nagari akan membagikan kepada seluruh anggota kelompok tani untuk di tanam di lahan mereka masing-masing.

Selain itu pemerintah nagari bekerjasama dengan Penyuluh Pertanian Lapangan yang di tugaskan di nagari Koto Rantang memberikan penyuluhan kepada petani. Penyuluhan yang telah di jalankan diantaranya penanaman jagung, kedele, penyuluhan mengenai bahaya penggunaan pestisida terhadap kesuburan tanah, penggunaan pupuk ramah lingkungan, dan cara pembuatan pupuk organik. Dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat petani diperlukan kerjasama dengan berbagai pihak. Dengan adanya kerjasama maka pemberdayaan masyarakat petani akan berjalan lebih baik. Menurut Susanti Gleydis (2014) Dalam proses pemberdayaan petani diperlukan sinergi dari berbagai pihak seperti Pemerintah pusat maupun daerah, sekolah menengah dan sekolah tinggi pertanian, Lembaga Swadaya Masyarakat, Departemen Pertanian, dan Koperasi Unit Desa. Lembaga-lembaga ini yang notabene mempunyai banyak pengetahuan dan skill di bidang pertanian dapat memberikan pendidikan, penyuluhan, pelatihan dan pendampingan kepada masyarakat tentang pertanian.

Pemberian pelatihan dan penyuluhan merupakan suatu upaya dalam memberikan daya berupa pengetahuan dan keahlian kepada petani sehingga dapat meningkatkan kemampuan, kapasitas, dan rasa percaya diri mereka agar mampu

mengatasi masalah kemiskinan yang sedang di hadapi serta untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Dengan adanya pelatihan dan penyuluhan diharapkan petani di nagari Koto Rantang tebanu dalam mengelola lahan pertanian dan penanganan hama tanaman, sehingga waktu yang ada lebih efektif dan efisien serta produktifitas produksi pertanian lebih meningkat.

Upaya pemerintah nagari Koto Rantang yang ketiga yaitu pemberian bantuan sarana produksi. Pemerintah nagari juga berupaya memberdayakan masyarakat petani melalui pemberian bantuan sarana produksi seperti pupuk, mesin perontok padi, benih dan bibit tanaman. Bibit tanaman yang di berikan diantaranya bibit cengkeh, kakao, durian, jeruk, manggis, benih padi, jagung dan kedele. Dengan pemberian bantuan benih dan bibit tanaman di harapkan petani dapat medayagunakan seluruh lahan pertanian yang dimiliki sehingga tidak ada lagi lahan tidur di nagari Koto Rantang serta dengan pemberian mesin perontok padi diharapkan petani lebih mudah dalam proses panen hasil taninya.

Berdasarkan analisis melalui obeservasi di lapangan menunjukkan upaya pemerintah nagari Koto Rantang dalam memberdayakan masyarakat petani sudah terlihat dengan adanya penguatan terhadap kelompok tani dan Gapoktan, pemberian pelatihan dan penyuluhan melalui program Teknologi Tepat Guna (TTG) Alat dan Mesin Pertanian, program Kebun Bibit Rakyat (KBR), program Tanam Padi Sebatang, dan pemberian sarana produksi pertanian seperti pupuk, mesin perontok padi, dan bibit tanaman. Namun masih ada

beberapa aspek yang belum terlaksana diantaranya: pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian, dimana belum adanya upaya dari pemerintah nagari dalam sarana pemasaran untuk hasil panen petani. Petani harus menjual sendiri hasil panennya dengan harga yang tidak stabil, ini mempengaruhi kemudahan dan peningkatan pendapatan masyarakat. Selain itu penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan juga belum yang belum memadai, serta kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi juga belum optimal karena di sebagian besar wilayah di nagari Koto Rantang belum ada sinyal maka berdampak pada sulitnya penyebaran pengetahuan, teknologi dan informasi.

Kendala yang Ditemui Pemerintah Nagari dalam Upaya Memberdayakan Masyarakat Petani di Nagari Koto Rantang

Kendala yang ditemui pemerintah nagari Koto Rantang yang pertama yaitu kurangnya kesadaran petani untuk bergabung dalam kelompok tani. Berdasarkan penelitian yang dilakukan ditemukan bahwa masih banyak petani di nagari Koto Rantang yang tidak tergabung dalam kelompok tani. Dari total 1.916 orang petani di nagari Koto Rantang hanya 515 orang yang tergabung dalam kelompok tani baik yang masih aktif maupun yang sudah tidak aktif. Petani pada umumnya malas bergabung ke dalam kelompok tani karena merasa akan menambah pekerjaan, dan hanya membuang-buang waktu mereka. Menurut teori perilaku X bahwa manusia itu pada dasarnya adalah pemalas, tidak bertanggung jawab, dan tidak mau bekerja keras sehingga perlu motivasi untuk mereka bekerja

lebih baik. Menurut Sukino (2016) adanya sikap petani "subsistens" artinya bagi petani itu, orang bekerja adalah untuk sekedar memenuhi kebutuhan hidup. Kalau kebutuhan hidup sudah terpenuhi maka orang tidak perlu bekerjakeras lagi. Sikap seperti ini merupakan salah satu pengambat dalam pemberdayaan petani.

Kendala yang kedua yaitu petani memanfaatkan kelompok hanya untuk kepentingan tertentu. Dalam penelitian juga ditemukan bahwa masih banyak petani yang memanfaatkan kelompok tani hanya untuk kepentingan tertentu, seperti jika mendengar ada bantuan yang akan turun dari pemerintah maka kelompok tani akan aktif kembali. Namun jika bantuan telah diterima maka petani akan kembali ke kehidupan mereka masing-masing. Setelah peneliti melakukan penelitian lebih lanjut di lapangan, dari total 27 (dua puluh tujuh) kelompok tani yang ada di nagari Koto Rantang ditemukan bahwa hanya 16 (enam belas) kelompok tani yang aktif dan 11 (sebelas) kelompok tani tidak aktif atau hanya aktif ketika ada bantuan yang akan turun. Hal ini menjadikan proses pemberdayaan terhadap petani menjadi terhambat karena sangat sulit mengumpulkan petani untuk memberikan pelatihan dan penyuluhan. Seperti bantuan pupuk, jagung, dan kedele setelah mendapatkan bantuan dari pemerintah nagari petani tidak mengikuti pelatihan dan penyuluhan tentang bagaimana proses menanam dan berapa takaran pupuk yang seharusnya diberikan. Sehingga manfaat dari bantuan yang mereka terima menjadi tidak optimal.

Kendala yang ketiga yaitu masyarakat petani susah adopsi teknologi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan ditemukan bahwa dari empat jorong yang ada di nagari Koto Rantang, hanya di Jorong Batang Palupuh yang menerapkan program dari pemerintah nagari yaitu program tanam padi sebatang (PTPS). Sebagian besar petani tidak mengaplikasikan Ilmu dan keterampilan yang telah diberikan oleh pemerintah nagari dan penyuluh pertanian. Petani tidak mau mencoba hal baru dan takut mengambil resiko terhadap usaha taninya, karena itu petani lebih memilih cara-cara tradisional yang biasa mereka lakukan untuk mengelola lahan pertaniannya. Menurut Sukino (2016) bahwa ada beberapa hal yang menyebabkan pengembangan teknologi pada masyarakat tani kurang berkembang dengan baik, yaitu bahwa petani mempunyai perilaku menolak resiko (risk), penggunaan teknologi membutuhkan tambahan modal dan peralatan, keterbatasan biaya yang dimiliki, serta status penguasaan tanah. Permasalahan yang peneliti temukan sesuai dengan teori dari Sukino bahwa petani mempunyai perilaku menolak resiko, sehingga lebih memilih cara-cara tradisional dalam mengolah lahan pertanian mereka.

Menurut Undang-undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Pasal 3 bahwa ada lima tujuan yang akan di capai dalam pemberdayaan petani, yaitu:

1. mewujudkan kemandirian petani dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kehidupan yang lebih baik.

2. menyediakan sarana dan prasarana Pertanian yang dibutuhkan dalam mengembangkan Usaha Tani;
3. melindungi Petani dari fluktuasi harga, praktik ekonomi, biaya tinggi, dan gagal panen;
4. meningkatkan kemampuan dan kapasitas Petani serta Kelembagaan Petani dalam menjalankan Usaha Tani yang produktif, maju, modern, dan berkelanjutan; dan
5. menumbuhkembangkan kelembagaan pembiayaan Pertanian yang melayani Kepentingan Usaha Tani.

Dengan berbagai kendala yang dihadapi oleh pemerintah nagari Koto Rantang dalam memberdayakan masyarakat petani mengakibatkan tujuan dari pemberdayaan petani sebagaimana yang di jelaskan dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani pada Pasal 3 belum tercapai secara maksimal di nagari Koto Rantang Kecamatan Palupuh Kabupaten Agam.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa upaya yang dilakukan pemerintah nagari Koto Rantang untuk memberdayakan masyarakat petani yaitu : pembentukan dan penguatan kelompok tani dan Gapoktan, memberikan pelatihan dan penyuluhan, pemberian bantuan sarana produksi seperti bibit tanaman cengkeh, durian pala, kakao, manggis, jeruk, pemberian benih tanaman seperti benih padi bermutu, jangung, dan kedele. Akan tetapi dalam menjalankan program pemberdayaan

masyarakat pemerintah nagari Koto Rantang menemui beberapa kendala, yaitu: rendahnya kemauan masyarakat petani untuk bergabung dalam kelompok tani, petani menggunakan kelompok tani hanya untuk kepentingan tertentu, serta masyarakat petani yang susah adopsi teknologi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmar, A., Mappamiring, M., & Parawangi, A. (2017). Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Petani Padi Di Desa Parumpanai Kecamatan Wasuponda Kabupaten Luwu Timur. *Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik*, 2(2), 120-136.
- Apsari, N. C., Gutama, A. S., Nurwati, N., Wibowo, H., Resnawaty, R., Darwis, R. S., ... & Humaedi, S. (2017). Pemberdayaan petani kopi melalui penguatan kapasitas dalam pengolahan hasil kopi di Desa Genteng, Kecamatan Sukasari, Kab. Sumedang. *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*, 4(2).
- Hamid, H. (2018). Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Petani Padi Di Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan. *Khazanah Ilmu Berazam*, 1, 32-48.
- Moleong, J. Lexy. (2014), *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Muhammad Indra Wijaya. (2017). *Peranan Pemerintah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Bidang Pertanian (Studi di Desa Toapaya Selatan Kecamatan Toapaya Kabupaten Bintan Tahun 2014)*.

- Skripsi. Tanjung Pinang: Ali Haji.
- Oroh, G. S. (2015). Peranan Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Pertanian di Desa Tumaratas Kecamatan Langowan Barat Kabupaten Minahasa. *Jurnal Politico*, 1(5).
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018. Tentang Nagari.
- Sarjono, Joni Joko dkk. (2014). *Peranan Pemerintah dalam Pemberdayaan Kaki Lima di Kecamatan Pontianak Timur*. Jurnal Tesis PMIS. UNTAS PSS. Universitas Tanjung Pura, Pntianak.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuntitatif Kualitatif dan R&B*. Bandung: Alabeta.
- Sukino, S. PKP. MM. (2016). *Membangun Pertanian dengan Pemberdayaan Pemberdayaan Masyarakat Tani (Terobosan Menanggulangi Kemiskinan)*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
- Wahyuni, S., Suhaeti, R. N., & Zakaria, A. K. (2016). Arah Kebijakan Pascarevisi Undang-Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. *Analisis Kebijakan Pertanian*, 12(2), 157-174.